

# **LAPORAN**

**HASIL PELAKSANAAN SURVEI  
PERSEPSI KORUPSI PADA  
PENGADILAN NEGERI KAB.  
KEDIRI**

**TRIWULAN I  
TAHUN 2021**

## DAFTAR ISI

<b>BABI .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. LatarBelakang.....	1
1.2. MaksudDanTujuan .....	2
1.3. LandasanHukum .....	2
1.4. RencanaKerja.....	3
<b>BABII.....</b>	<b>4</b>
<b>METODOLOGI.....</b>	<b>4</b>
2.1. MetodePenelitian.....	4
2.2. PopulasiDanSampel .....	4
2.3. Lokasi Penelitian DanUnitAnalisis.....	4
2.4. Teknik Pengumpulan Data DanQualityControl.....	5
2.5. TeknikAnalisisData .....	5
2.6. Tahapanpelaksanaan .....	6
<b>BABIII.....</b>	<b>8</b>
<b>INDEKSPERSEPSIKORUPSI.....</b>	<b>8</b>
3.1. Profilresponden.....	8
3.2. Indeks persepsi korupsiperindikator .....	9
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerjapadapengadilan.....	14
3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayananSatuan Kerja pada pengadilan.....	15
<b>BABIV.....</b>	<b>17</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>17</b>
4.1. Kesimpulan.....	17
4.2. Rekomendasi .....	17
<b>LAMPIRAN</b>	
KUESIONER	

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat ALLAH SWT, telah disusun Laporan Survey Persepsi Korupsi di Pengadilan Negeri Kab. Kediri Kelas IB semester III tahun 2021 ini.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam perbaikan pelayanan public yang berorientasi wilayah bebas dari korupsi adalah dengan melakukan Survey Persepsi Korupsi kepada pengguna layanan pengadilan. Dalam survey ini data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrument kuesioner yang diisi tanpa melakukan tatap muka. Survey dilakukan kepada para pengunjung dan pengguna layanan Pengadilan Negeri Kab. Kediri Kelas IB.

Sebagai pertanggungjawaban atas Kinerja Tim Survey maka disusun laporan ini yang dimaksud untuk memberikan informasi bahwa Pengadilan Negeri Kab. Kediri Kelas IB mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil.

Semoga hasil Survey ini dapat membantu memberikan masukan yang positif bagi Pengadilan Negeri Kab. Kediri Kelas IB dan sekaligus menjadi acuan untuk meningkatkan pelayanan bagi pengguna layanan Pengadilan serta sebagai bahan untuk mengevaluasi kinerja organisasi agar dapat terwujudnya wilayah bersih dari korupsi.

Demikian Laporan Survey Persepsi Korupsi pada pengadilan Negeri Kab. Kediri Kelas IB semester I tahun 2021 ini disusun dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Pembina Pembangunan Zona Integritas  
Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

Kediri, MARET 2021  
Ketua Tim.

AGUS TIAHJO MAHENDRA, SH.  
NIP. 19690805 199603 1003

GITA TRIYANTO NURCAHYO, SE., SH.  
NIP. 19770305 200212 1003

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.LatarBelakang**

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

## **1.2. Maksud Dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

## **1.3. Landasan Hukum**

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

## **1.4. Rencana Kerja**

### **1.4.1. Persiapan**

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- PenetapanPelaksana  
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- PenyiapanBahan
  - a. Kuesioner melalui aplikasi siSUPER.
  - b. Bagian dariKuesioner/Pengantar
  - c. Kelengkapanperalatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
  - a. JumlahResponden.
  - b. Lokasi dan Waktu PengumpulanData.
- PenyusunanJadwal  
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

### **1.4.2. Pelaksanaan PengumpulanData**

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalamkuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telahdisediakan.
- Pengujian kualitas dan validitasdata.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitasresponden.

### **1.4.3. MetodeSurvei**

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 6 bulan (dua kali dalam satu tahun).

## **BAB II**

### **METODOLOGI**

#### **2.1. Metode Penelitian**

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

#### **2.2. Populasi Dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik accidental sampling. Accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

#### **2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri/Tinggi

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

#### **2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan QualityControl.**

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu satu bulan atau data minimal 100 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

#### **2.5. Teknik Analisis Data**

Analisis data untuk menentukan indeks korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:

**Pertama**, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini.

**Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.



## 2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

**Tabel 1**

**Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas**



**Tabel 2**

**Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi**

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

**Tabel 3**  
**Nilai Persepsi**

<b>Nilai Persepsi</b>	<b>Nilai Interval</b>	<b>Nilai Interval Konversi IPK</b>	<b>Mutu</b>	<b>Kinerja</b>
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

**BAB III**  
**INDEKS PERSEPSI KORUPSI**

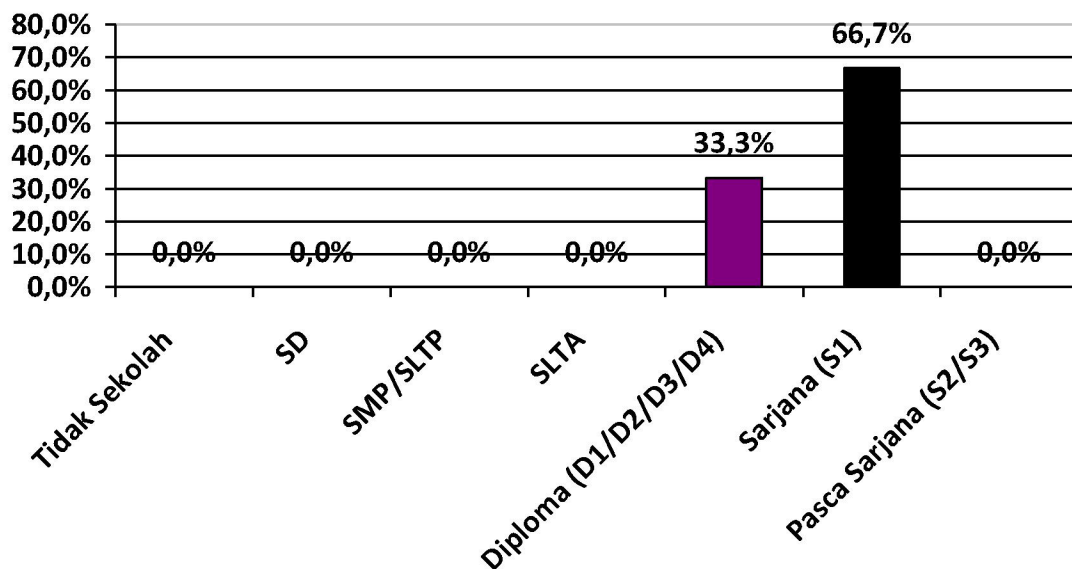
**3.1. Profilresponden**

3.1.1. Tingkat pendidikanresponden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan mayoritas memiliki terakhir Sarjana (1) adalah 77responden dengan persentase 66,7 %.

**Tabel 4.**  
**Tingkat pendidikan responden**

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	%
1	Tidak Sekolah	0	0
2	SD	0	0
3	SMP / SLTP	0	0
4	SLTA	0	0
5	Diploma (D1/D2/D3/D4)	2	33,3
6	Sarjana (S1)	4	66,7
7	Pasca Sarjana (S2/S3)	0	0
Jumlah		6	100.0

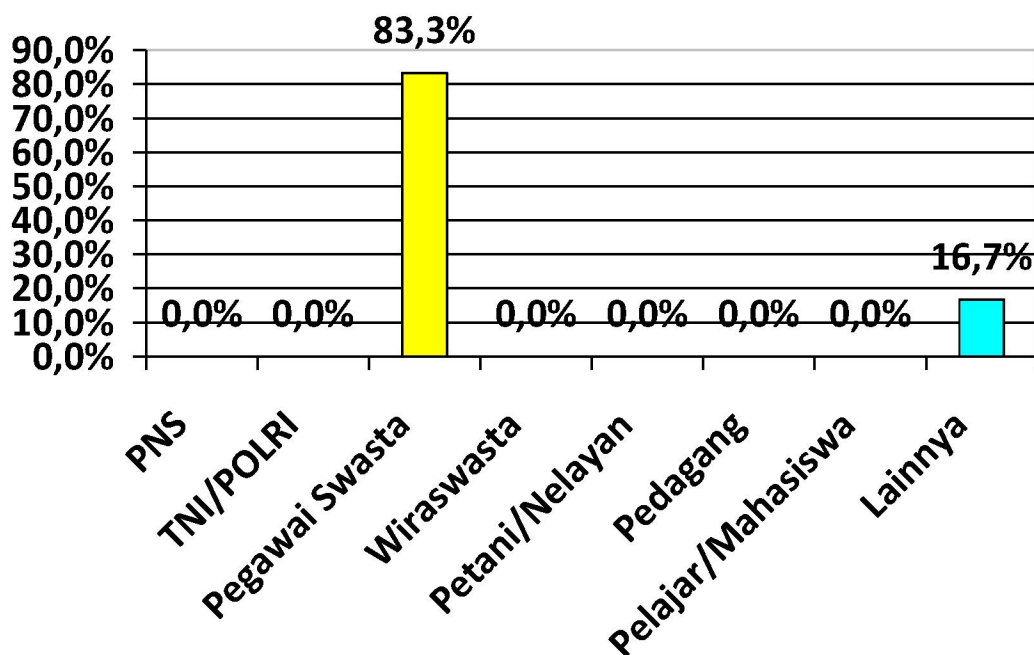


### 3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 42,7% responden pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan memiliki pekerjaan sebagai Pelajar / Mahasiswa.

**Tabel 5.**  
**Jenis pekerjaan responden**

No	Pekerjaan Utama	Frekuensi	%
1	PNS	0	0,0
2	TNI/POLRI	0	0,0
3	Pegawai Swasta	0	0,0
4	Wiraswasta	5	83,3
5	Petani / Nelayan	0	0,0
6	Pedagang	0	0,0
7	Pelajar / Mahasiswa	0	0,0
8	Lainnya	1	16,7
Jumlah		6	100.0



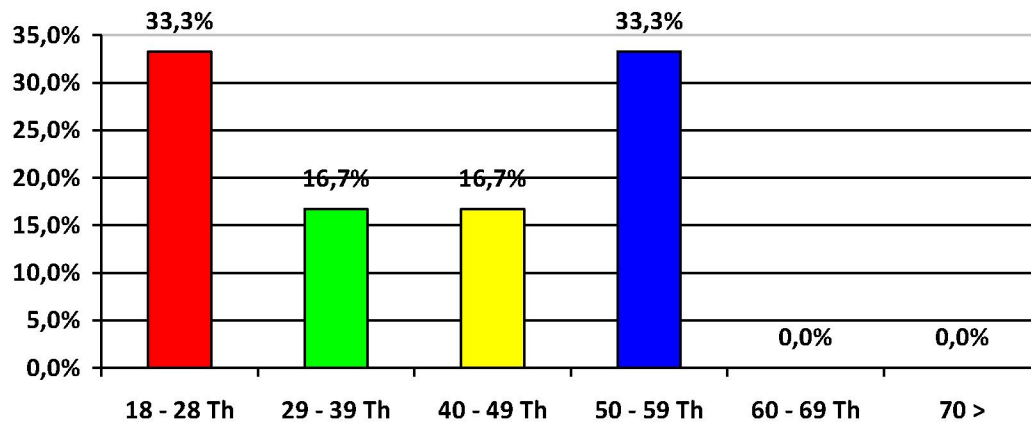
### 3.1.3. Kelompok usiaresponden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 18 tahun s/d 28 tahun dan 50 tahun s/d 59 Tahun. Bagi kelompok usia di atas 59 tahun, jumlah responden semakin mengecil, demikian pula kelompok usia di bawah 60 tahun.

**Tabel 6.**

**Usia responden**

No	Umur	Frekuensi	%
1	18 – 28 Th	2	33,3
2	29 – 39 Th	1	16,7
3	40 – 49 Th	1	16,7
4	50 – 59 Th	2	33,3
5	60 - 69 Th	0	0
6	70>	0	0
Jumlah		6	100.0



### 3.2. Indeks persepsi korupsi perindikator.

#### 3.2.1 Indikator Manipulasi Peraturan

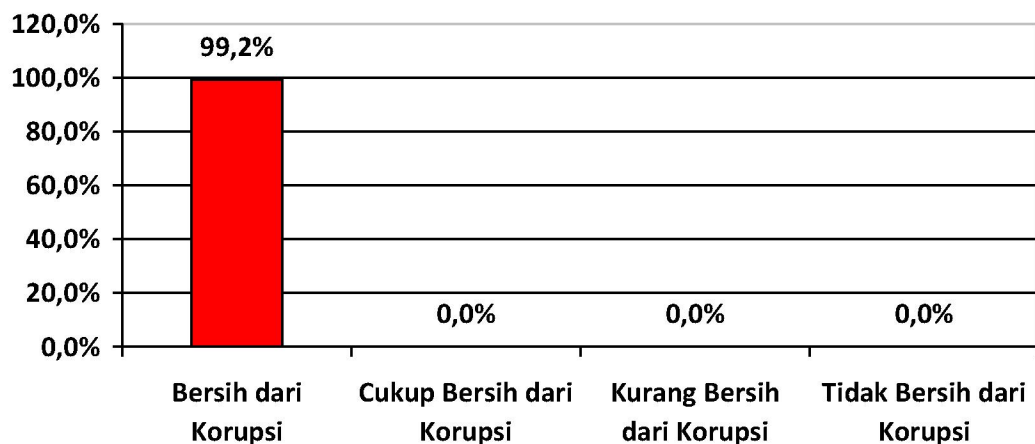
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index 4,000

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari manipulasi peraturan.

**Tabel 7.**

**Indeks pada indikator manipulasi peraturan**

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Bersih dari Korupsi	4	6	100,0
2.	Cukup Bersih dari Korupsi	3	0	0,0
3.	Kurang Bersih dari Korupsi	2	0	0,0
4.	Tidak Bersih dari Korupsi	1	0	0,0
Jumlah			6	100,0



### 3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan.

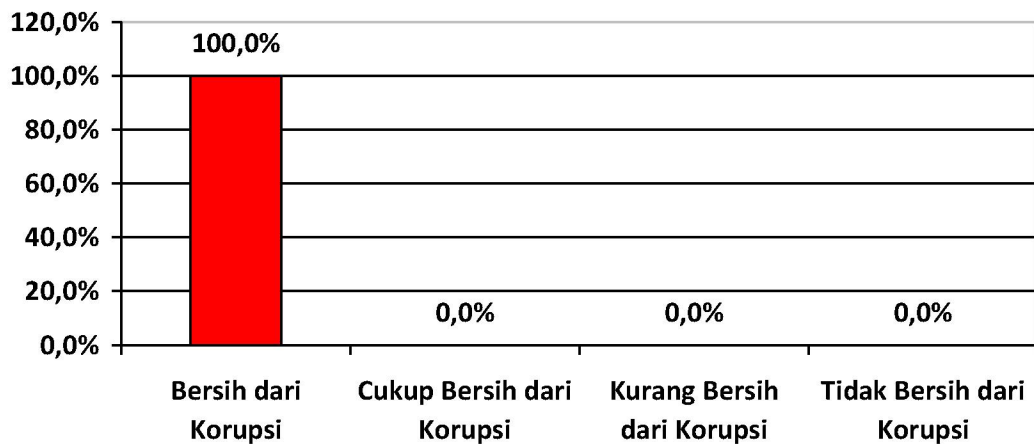
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index 4,000

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari Penyalahgunaan Jabatan.

**Tabel 8.**

**Indeks pada penyalahgunaan jabatan**

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Bersih dari Korupsi	4	6	100,0
2.	Cukup Bersih dari Korupsi	3	0	20,0
3.	Kurang Bersih dari Korupsi	2	0	0,0
4.	Tidak Bersih dari Korupsi	1	0	0,0
Jumlah			6	100,0



### 3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh.

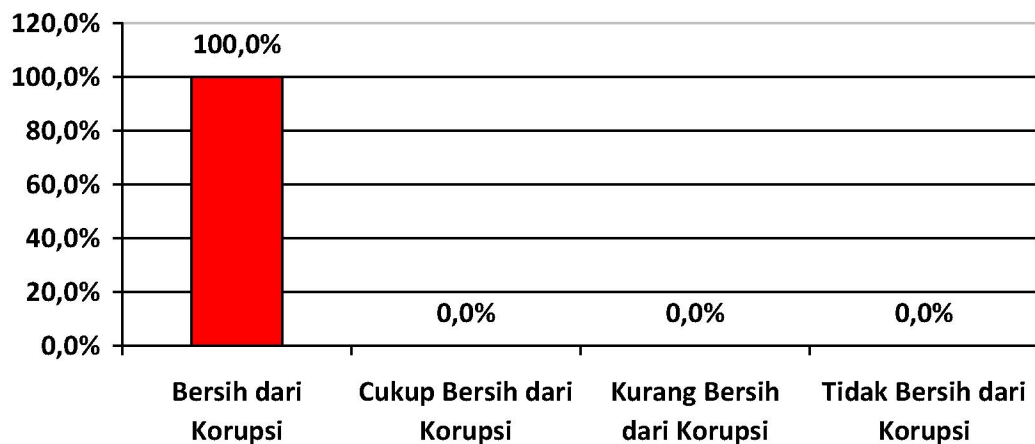
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 4,000

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dan tidak ada yang menjual pengaruh di satuankerja.

**Tabel 9.**

**Indeks pada indikator menjual pengaruh**

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Bersih dari Korupsi	4	6	100,0
2.	Cukup Bersih dari Korupsi	3	0	0,0
3.	Kurang Bersih dari Korupsi	2	0	0,0
4.	Tidak Bersih dari Korupsi	1	0	0,0
Jumlah			6	100.0





### 3.2.4. Indikator TransaksiBiaya

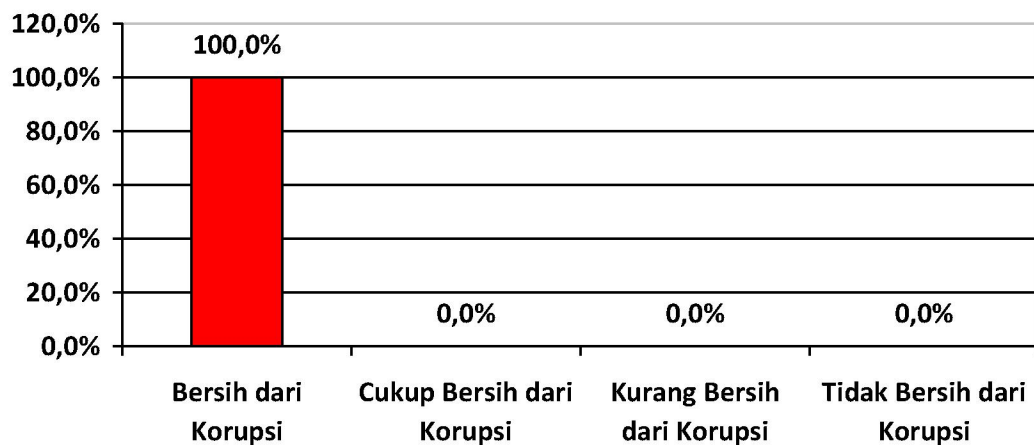
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 4,000

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan tidak ada transaksi rahasia.

**Tabel 10.**

**Tabel indeks pada indikator transaksi biaya**

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Bersih dari Korupsi	4	6	100,00
	Cukup Bersih dari Korupsi	3	0	
3.	Kurang Bersih dari Korupsi	2	0	0,0
4.	Tidak Bersih dari Korupsi	1	0	0,0
Jumlah			6	100.0



### 3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

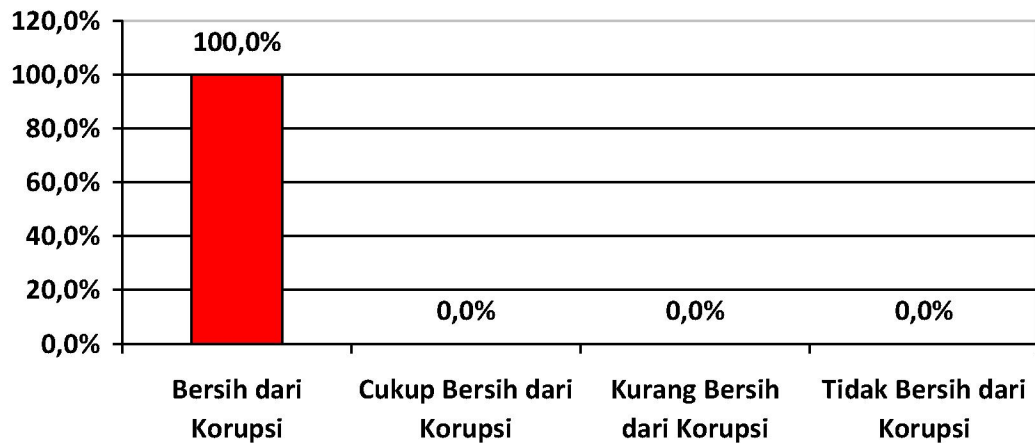
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index 4,000

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan tidak menerapkan adanya biaya tambahan.

**Tabel 11.**

**Indeks pada indikator biaya tambahan**

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Bersih dari Korupsi	4	6	100,0
2.	Cukup Bersih dari Korupsi	3	0	0,0
3.	Kurang Bersih dari Korupsi	2	0	0,0
4.	Tidak Bersih dari Korupsi	1	0	0,0
Jumlah				100.0

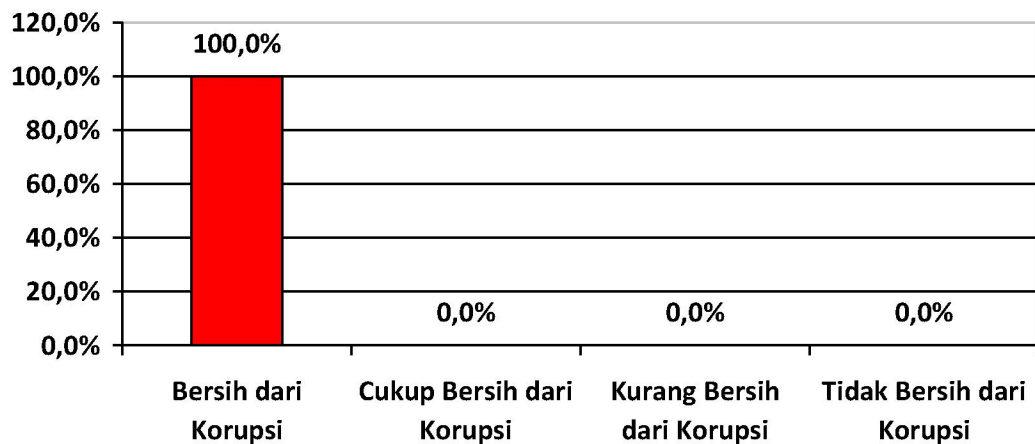


### 3.2.6. Indikator Hadiah.

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index 4,000 Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan tidak menerima hadiah dari pihak manapun.

**Tabel 12.**  
**Indeks pada indikator hadiah**

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Bersih dari Korupsi	4	6	100,0
2.	Cukup Bersih dari Korupsi	3	0	0,0
3.	Kurang Bersih dari Korupsi	2	0	0,0
4.	Tidak Bersih dari Korupsi	1	0	0,0
Jumlah			120	100.0



### 3.2.7. Indikator Transparansi Biaya

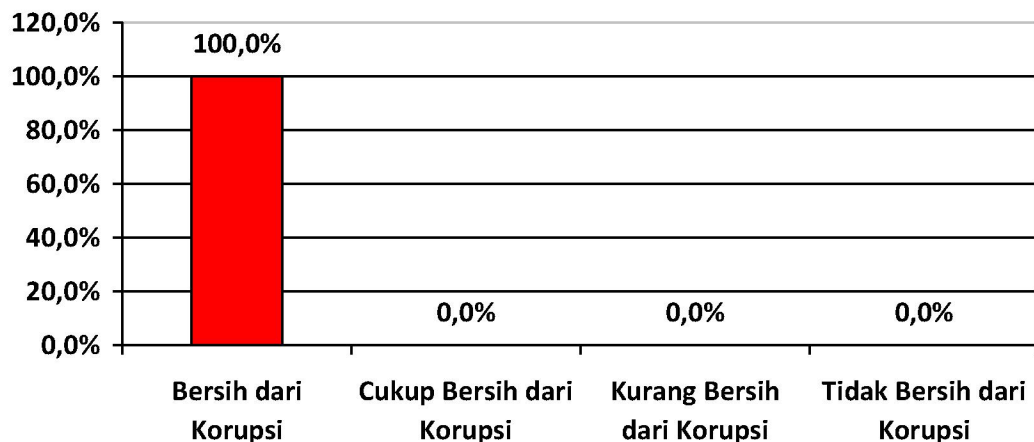
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada index 4.000

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan transparan dalam pengelolaan pembiayaan.

**Tabel 13.**

**Indeks pada indikator transparansi biaya**

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Bersih dari Korupsi	4	6	100
2.	Cukup Bersih dari Korupsi	3	0	0,0
3.	Kurang Bersih dari Korupsi	2	0	0,0
4.	Tidak Bersih dari Korupsi	1	0	0,0
Jumlah			6	100.0

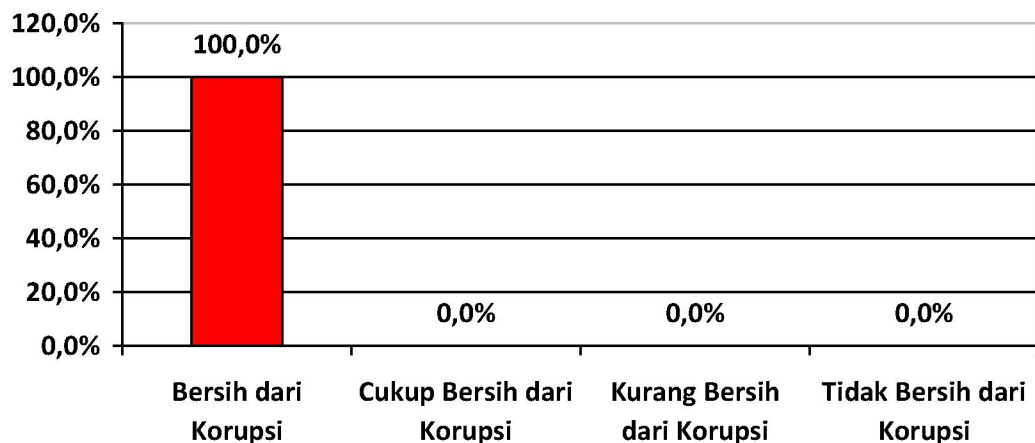


### 3.2.8. Indikator Percaloan.

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 4.000 Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari tindakan Percaloan.

**Tabel 14.**  
**Indeks pada indikator percaloan**

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Bersih dari Korupsi	4	6	100,0
2.	Cukup Bersih dari Korupsi	3	0	0,0
3.	Kurang Bersih dari Korupsi	2	0	0,0
4.	Tidak Bersih dari Korupsi	1	0	0,0
Jumlah			6	100.0



### 3.2.9. Indikator Perbuatan Curang.

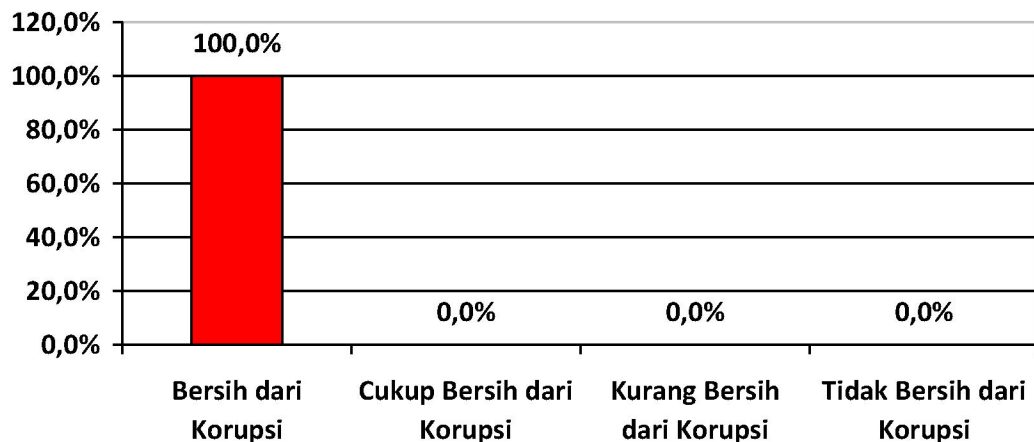
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 4,000

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari perbuatan curang.

**Tabel 15.**

**Indeks pada indikator perbuatan curang**

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Bersih dari Korupsi	4	6	100,0
2.	Cukup Bersih dari Korupsi	3	2	3,0
3.	Kurang Bersih dari Korupsi	2	0	0,0
4.	Tidak Bersih dari Korupsi	1	0	0,0
Jumlah			6	100.0



### 3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia.

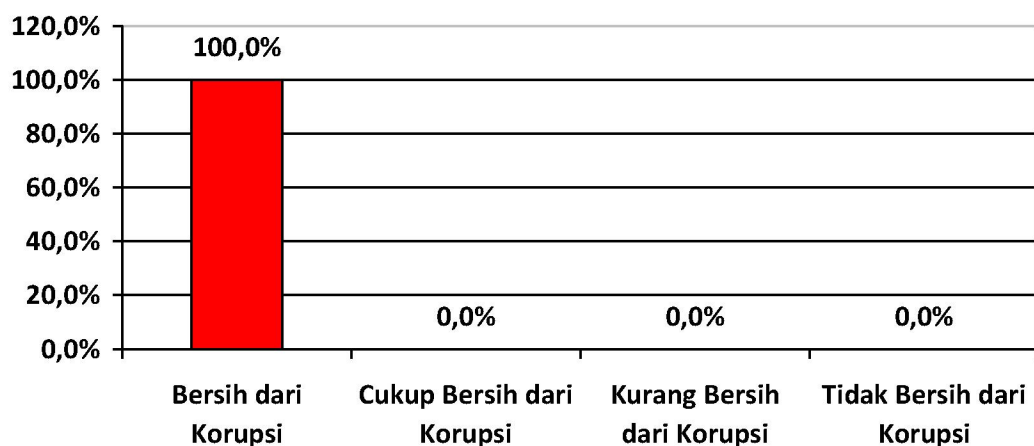
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 4.000

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari adanya benturan kepentingan.

**Tabel 16.**

**Indeks pada indikator Transaksi Rahasia**

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Bersih dari Korupsi	4	6	100,0
2.	Cukup Bersih dari Korupsi	3	0	0,0
3.	Kurang Bersih dari Korupsi	2	0	0,0
4.	Tidak Bersih dari Korupsi	1	0	0,0
Jumlah			6	100.0



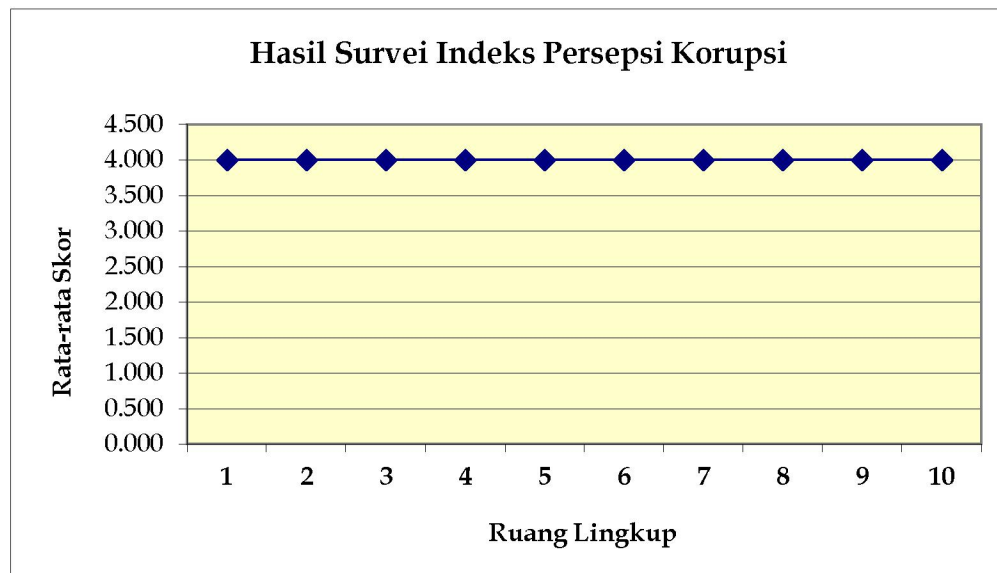
### 3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Kab. Kediri sebesar 93,27.

**Tabel 17.**

**Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri**

Ket	Indikator										
	Manipulasi Peraturan	Penyalahgunaan Jabatan	Menjual Pengaruh	Transaksi Biaya	Biaya Tambahan	Hadiah	Transparansi Biaya	Percalaan	Perbuatan Curang	Transaksi Rahasia	
Jumlah	508	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
NRR per RL	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4	4,000	
NRR Tertimbang	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	4,000
<b>NILAI PERSEPSI KORUPSI</b>											<b>100,00</b>



Indeks 99,33 tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 81,26 – 100,00



**Tabel 18.**  
**Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada**  
**Pengadilan Negeri Kab. Kediri**

<b>NILAI PERSEPSI</b>	<b>NILAI INTERVAL</b>	<b>NILAI INTERVAL KONVERSI IPK</b>	<b>MUTU</b>	<b>KINERJA</b>
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidakbersih Darikorupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari Korupsi

### **3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja padapengadilan**

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut:

**Tabel 19.**  
**Isian masukan dan pandangan pengguna layanan**  
**Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri**

<b>No</b>	<b>Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri</b>
1	Agar biaya yang diperlukan untuk setiap jenis pelayanan bisa diakses secara publik dan transparan
2	Agar informasi perkara secara online lebih

	disosialisasikan.
3	Agar prosedur pelayanan lebih diperjelas.
4	Kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang dikenakan agar lebih ditekankan.
5	Agar syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, bisa lebih dipermudah.
6	Agar penegakan hukum dalam penanganan korupsi lebih ditingkatkan.

### **3.5. Hasil Survei Kualitatif**

Hasil survei kualitatif pada penelitian ini diperoleh dari hasil saran-saran responden yang ditulis di dalam angket yang telah disebar. Saran-saran perbaikan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Kelas IB, yang diusulkan responden, adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan sangat baik.
2. Pelayanan sangat baik.
3. Pendaftaran sangan mudah.
4. Pelayanan sangat mudah.
5. Pelayanan sangat sopan dan ramah.
6. Di Pertahankan .

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Kab.Kediri diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri memiliki Indeks Persepsi Korupsi 99,33 **atau** masuk pada kategori BERSIH DARI KORUPSI

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 4,000
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4,000
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 4,000
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 4,000
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 4,000
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 4,000
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 4,000
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 4,000
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 4,000
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 4,000

#### **4.2. Rekomendasi**

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Kab. Kediri Tahun 2021 bulan Januari s/d Maret tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 100,00 atau masuk pada persepsi 81,26 – 100,00 Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator Hadiah memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.







146											
147											
148											
149											
150											
Jumlah	508	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
NRR per RL	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4	4.000	
NRR Tertimbang	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	4.000
<b>NILAI PERSEPSI KORUPSI</b>											<b>100.00</b>

**Keterangan :**

- RL = Ruang Lingkup Persepsi Korupsi
- NRR = Nilai rata-rata
- IKM = Indeks Persepsi Korupsi
- \*) = Jumlah NRR IKM tertimbang
- \*\*) = Jumlah NRR Tertimbang x 25
- NRR Per RL = Jumlah nilai per Indikator dibagi dengan jumlah kuesioner yang terisi
- NRR tertimbang = NRR per Indikator x (1/10)

**INDEKS PERSEPSI KORUPSI : 100.00**

**Kategori: BERSIH DARI KORUPSI**

**Nilai Persepsi Korupsi :**

- 4 (Bersih dari Korupsi) : 81,26 - 100,00 : 3,26 - 4,00
- 3 (Cukup Bersih dari Korupsi) : 62,51 - 81,25 : 2,51 - 3,25
- 2 (Kurang Bersih dari Korupsi) : 43,76 - 62,50 : 1,76 - 2,50
- 1 (Tidak Bersih dari Korupsi) : 25,00 - 43,75 : 1,00 - 1,75

**Tabel**

**RINGKASAN SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI**

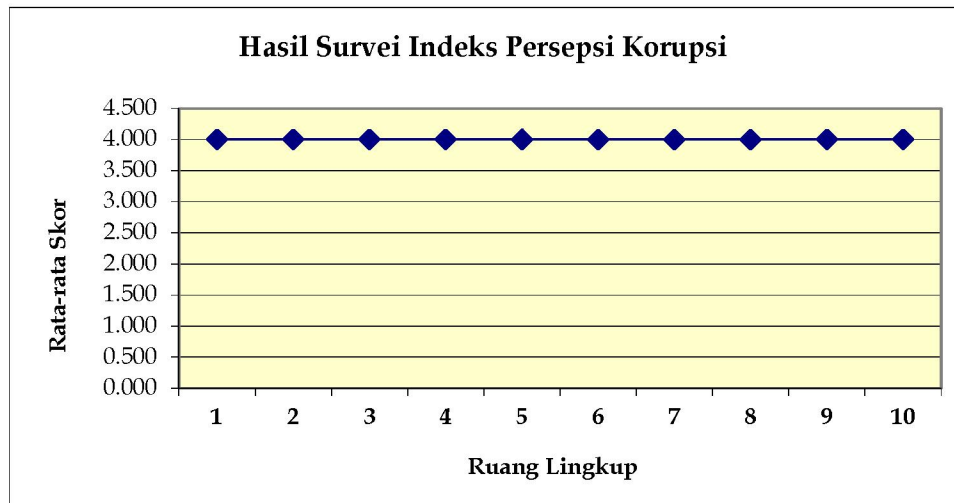
Survey Indeks Persepsi Korupsi:

**100.00**

**Kategori: BERSIH DARI KORUPSI**

Nomor	Ruang Lingkup / Indikator	Nilai	Kategori	Peringkat
1	Manipulasi Peraturan	4.000	Sangat Baik	1
2	Penyalahgunaan Jabatan	4.000	Sangat Baik	1
3	Menjual Pengaruh	4.000	Sangat Baik	1
4	Transaksi Biaya	4.000	Sangat Baik	1
5	Biaya Tambahan	4.000	Sangat Baik	1
6	Hadiah	4.000	Sangat Baik	1
7	Transparansi Biaya	4.000	Sangat Baik	1
8	Percaloan	4.000	Sangat Baik	1

9	Perbuatan Curang	4.000	Sangat Baik	1
10	Transaksi Rahasia	4.000	Sangat Baik	1



**KETUA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS**

**Evan Setiawan Dese, SH**  
**NIP. 19780504 200704 1 001**

**KETUA TIM SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI**

**Gita Triyanto Nurcahyo, SE., SH.**  
**NIP. 19790920 200604 1 003**

**PEMBINA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
 PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI**

**Agus Tjahjo Mahendra, SH.**



**ANALISIS DATA SPAK TRIWULAN I**  
**BULAN JANUARI - MARET TAHUN 2021**  
**DENGAN NILAI INDEKS 4,00 / 100,00 %**

**Frequency Table**

**VAR00001**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.00	6	100.0	100.0	100.0

**VAR00002**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.00	6	100.0	100.0	100.0

**VAR00003**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.00	6	100.0	100.0	100.0

**VAR00004**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.00	6	100.0	100.0	100.0

**VAR00005**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.00	6	100.0	100.0	100.0

**VAR00006**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.00	6	100.0	100.0	100.0

**VAR00007**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.00	6	100.0	100.0	100.0

**VAR00008**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.00	6	100.0	100.0	100.0

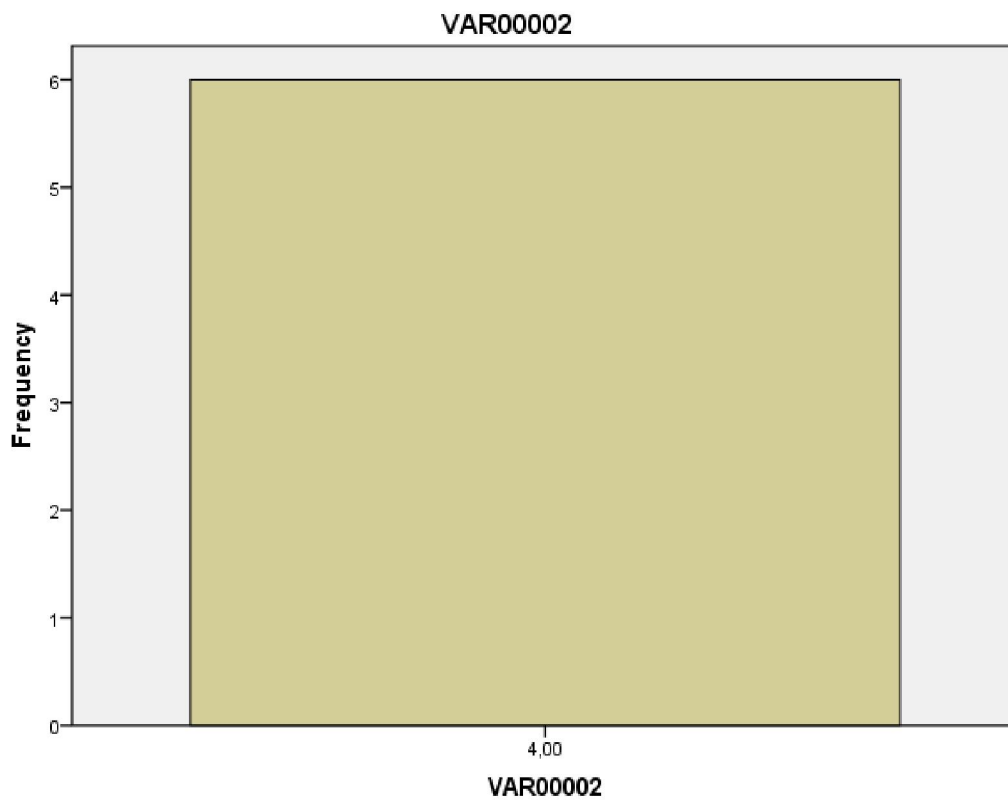
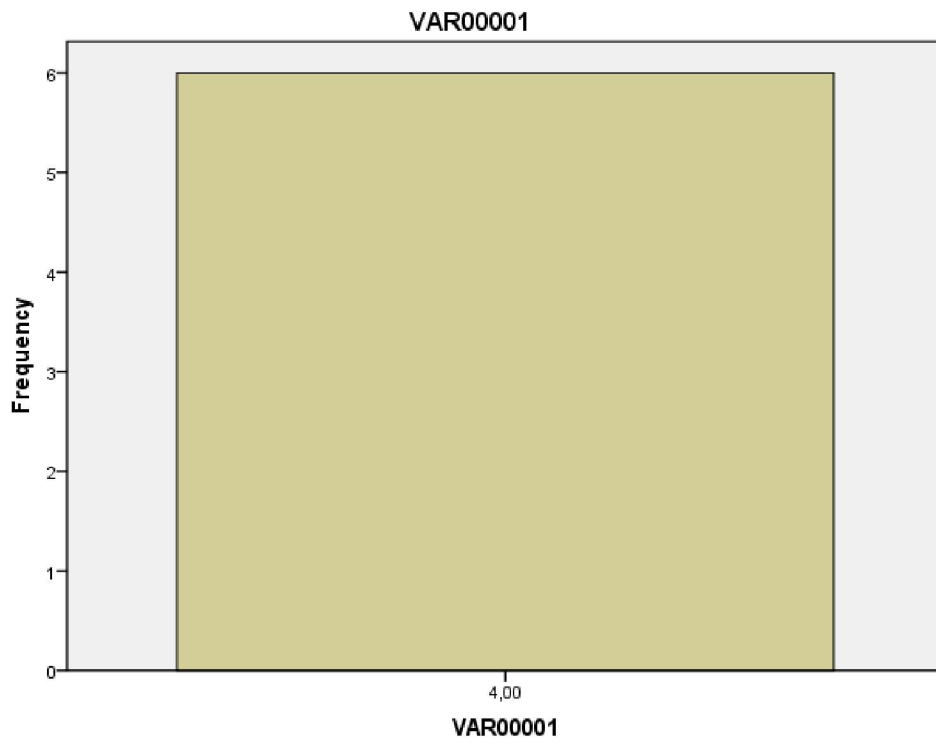
**VAR00009**

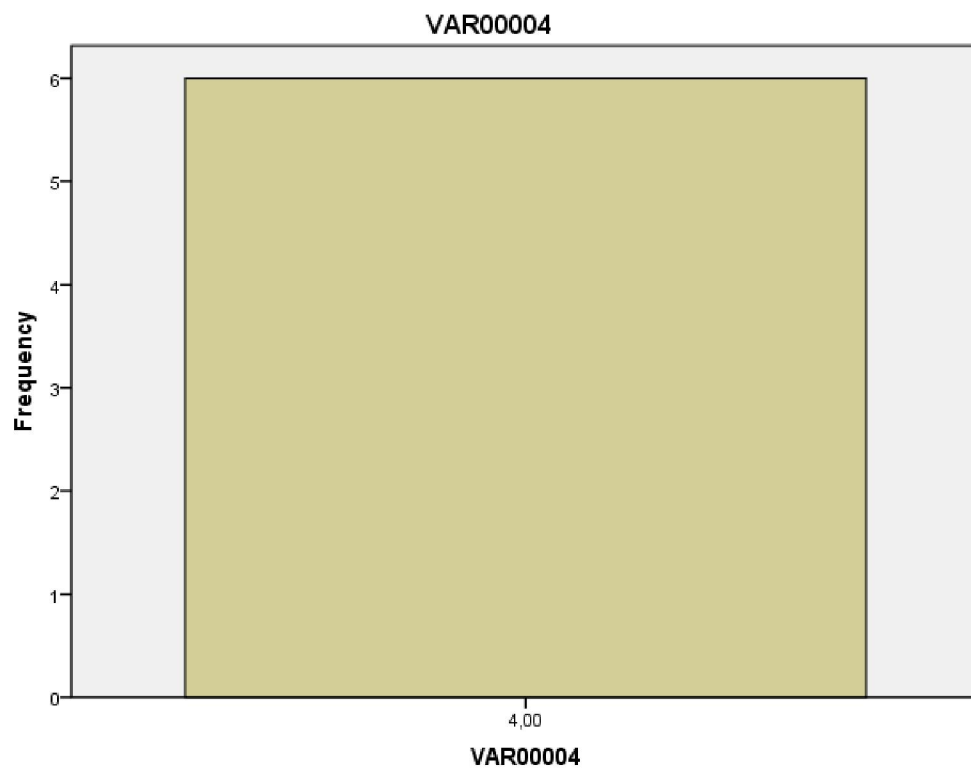
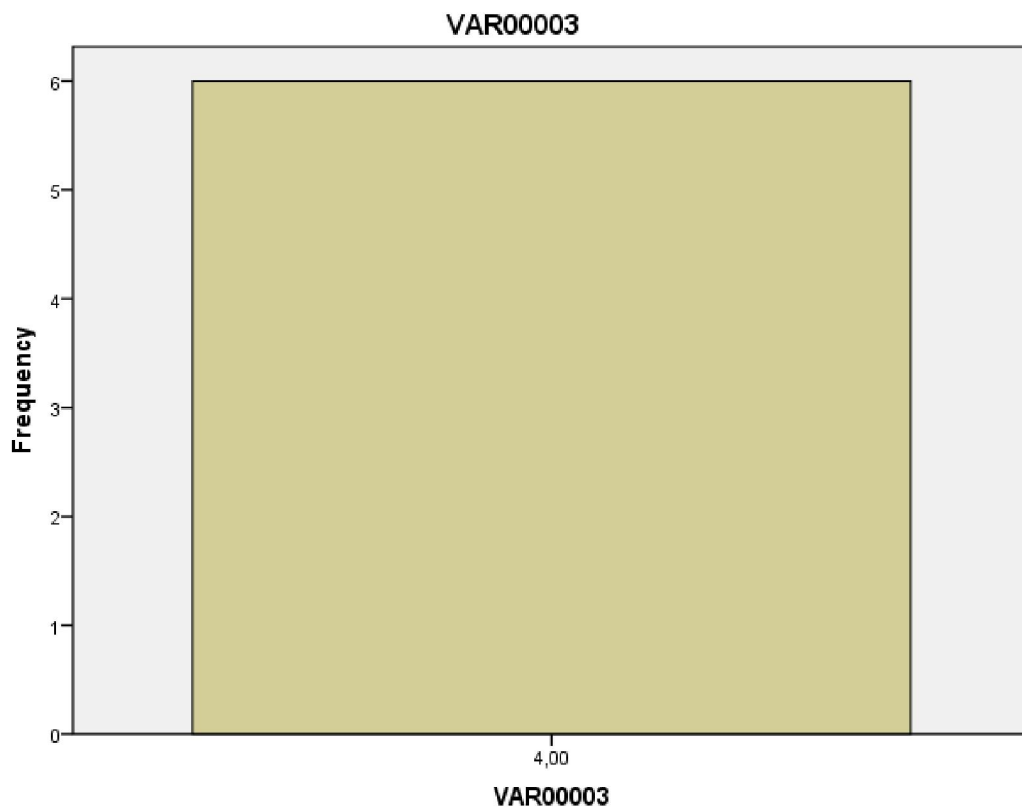
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.00	6	100.0	100.0	100.0

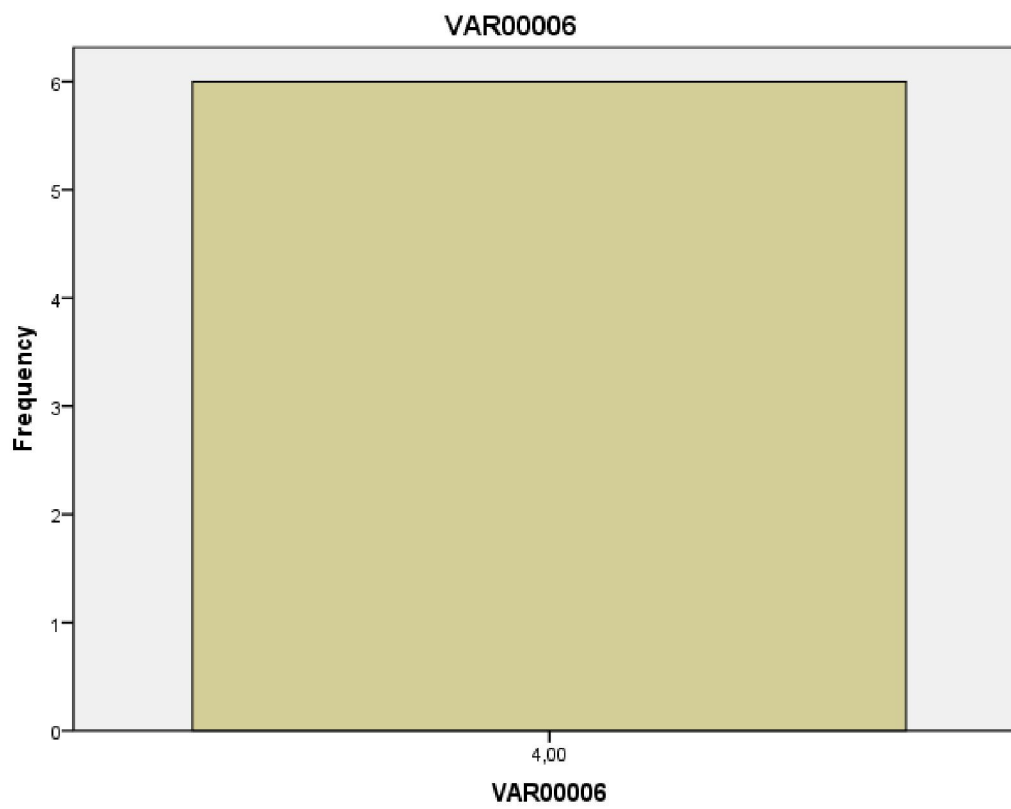
**VAR00010**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.00	6	100.0	100.0	100.0

# Bar Chart







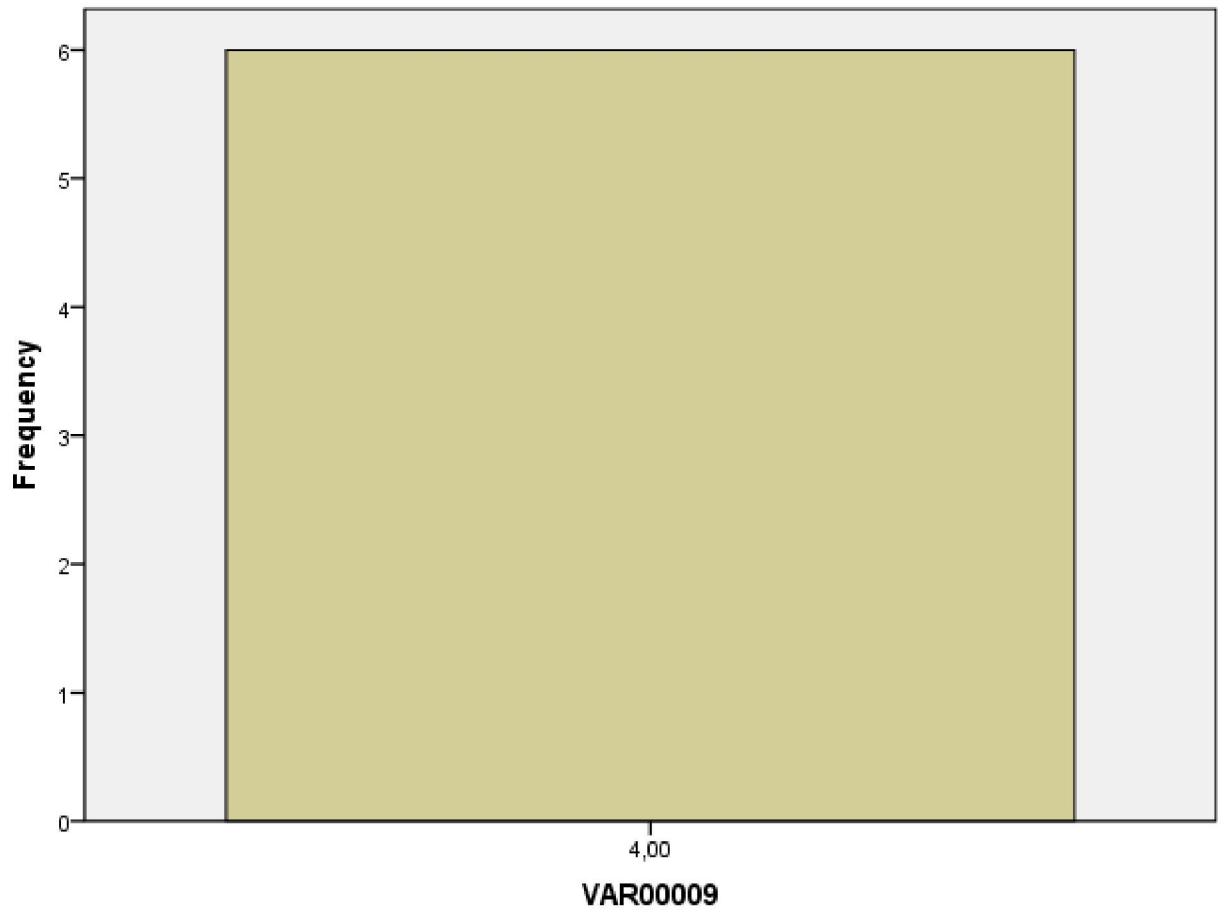
VAR00007



VAR00008

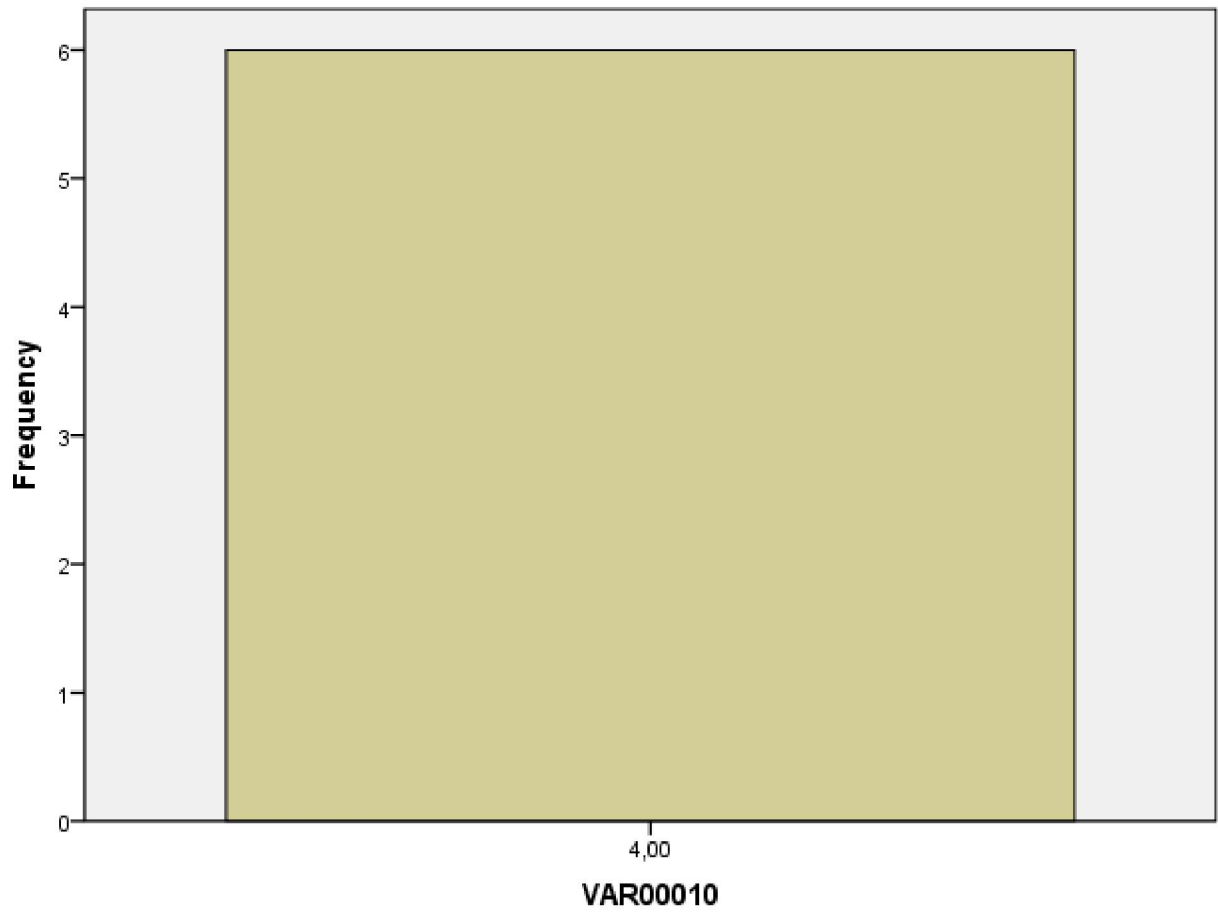


VAR00009





VAR00010



## NILAI INDEKS TOTAL DAN DETIL RESPONDEN SPAK PERIODE JANUARI SAMPAI MARET 2021

Grade	Keterangan	Skala (25-100)	Skala (1-4)
A	Bersih Dari Korupsi	81,26-100,00	3,26-4,00
B	Cukup Bersih Dari Korupsi	62,51-81,25	2,51-3,25
C	Kurang Bersih Dari Korupsi	43,76-62,50	1,76-2,50
D	Tidak Bersih Dari Korupsi	25,00-43,75	1,00-1,75

[CETAK LAPORAN](#)
[6 RESPONDEN](#)

Filter Berdasarkan

Pilih

[TAMPILKAN](#)
[RESET](#)

Deskripsi	P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10
Jumlah	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
NRR Per RL	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
NRR Tertimbang	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
IPK Unit Pelayanan	100.00 (A) - Bersih Dari Korupsi									

## DETIL RESPONDEN SPAK PERIODE JANUARI SAMPAI MARET 2021

Filter Berdasarkan

Pilih

TAMPAIKAN
RESET

Deskripsi	P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10
Jumlah	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
NRR Per RL	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
NRR Tertimbang	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40

IPK Unit Pelayanan 100.00 (A) - Bersih Dari Korupsi

No	No Responden	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pekerjaan	Waktu Survei	Detail
1	RSP-0036	maeen	34	Perempuan	Diploma (D1-D4)	Swasta	2021-02-02 16:02:08	<span style="background-color: #28a745; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">🔍</span>
2	RSP-0035	johan	45	Laki-laki	Sarjana (S1)	Swasta	2021-02-02 16:01:24	<span style="background-color: #28a745; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">🔍</span>
3	RSP-0034	yudha	56	Laki-laki	Sarjana (S1)	Swasta	2021-02-02 08:10:33	<span style="background-color: #28a745; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">🔍</span>
4	RSP-0033	edi	24	Laki-laki	Diploma (D1-D4)	Swasta	2021-02-02 08:10:00	<span style="background-color: #28a745; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">🔍</span>
5	RSP-0032	Aprianto Hutomo, S.H.	24	Laki-laki	Sarjana (S1)	Advokat/Pengacara	2021-01-27 08:11:10	<span style="background-color: #28a745; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">🔍</span>
6	RSP-0031	johan	56	Laki-laki	Sarjana (S1)	Swasta	2021-01-27 07:47:59	<span style="background-color: #28a745; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">🔍</span>
No	No Responden	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pekerjaan	Waktu Survei	Detail